

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat (Kuncoro, 2014).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam, sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Pengklasifikasian antara negara maju, berkembang, atau negara terbelakang dapat menggunakan indikator IPM. IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks IPM terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dengan tingkat produktifitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktifitas masyarakat akan meningkat (Primandari, 2019).

Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memotivasi manusia untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dengan bekerja keras, rajin dan tekun di berbagai bidang sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitasnya guna memakmurkan bumi (memajukan bumi dengan pembangunan manusianya), sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفُومَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun kepadaNya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do’a hamba-Nya)”(QS. Hud: 61).

Ayat tersebut dengan jelas mengabarkan fungsi dan peran manusia dihadirkan di muka bumi adalah untuk memakmurkannya (memajukan bumi dengan pembangunan manusianya) (Suyuthi, 2013). Tugas dan tanggungjawab ini menjadi kewajiban bersama umat manusia dengan tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kesemuanya memikul amanat dalam kapasitasnya sebagai khalifah/pemakmur di pentas dunia. Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang diperuntukkan bagi umat manusia dengan cara memberdayakannya melalui usaha dan kerja untuk kebaikan dunia dan akhirat. Berusaha dan bekerja tentunya tidak terlepas dari peran memakmurkan bumi Allah SWT. Itulah peran manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Sehingga terwujud berbagai kemashlahatan dan terhindar dari fasad (kerusakan).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Adisasmita, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 2011). Indeks IPM dapat didorong oleh Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga

diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Angka melek huruf berkaitan langsung dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keterkaitan pendidikan dan IPM sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Megantara & Made, 2020).

Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang memiliki pengaruh besar dan secara langsung bagi. Secara umum, kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan dan menjadi tekanan secara psikologis. Sehingga tidak mengherankan bila pengangguran menjadi bahan perbincangan yang cukup menarik dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu

usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Dampak negatif dari pengangguran adalah dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang itu berarti tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan menurun. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun akibat dari pengangguran dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia karena dengan tidak memiliki pendapatan, maka penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya termasuk pendidikan, kesehatan dan sudah tentu akan menurunkan daya beli. Dalam bidang politik pengangguran memberikan efek buruk karena kemungkinan akan terjadi kekacauan politik dan sosial yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013).

Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah ini penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan berdasarkan data IPM, pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah mencapai 70,91. Angka ini meningkat sebesar 0,49 poin atau tumbuh sebesar 0,70 persen dibandingkan tahun 2018. Terkait dengan angka melek huruf, anak-anak di Kalimantan Tengah yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,57 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I), lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,51 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,14 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun

2019, masyarakat Kalimantan Tengah memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11,24 juta rupiah per tahun, meningkat 305 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya (BPS Kalimantan Tengah, 2020).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019 ini dilandasi oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu, yaitu Primandari (2019) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004-2018. Penelitian Megantara & Made (2020) dengan hasil analisis yang menunjukkan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kemudian Penelitian Si'lang *et al.*, (2019) yang menyimpulkan bahwa: 1) PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat; 2) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; 3) Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di

Provinsi Sulawesi Barat; 4) Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; 6) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan fenomena di atas mendorong peneliti untuk melihat bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi, angka melek huruf, dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul ”**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah?
- b. Bagaimana pengaruh angka melek huruf terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah?
- c. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pengaruh angka melek huruf terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Pengaruh jumlah pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Masukan dinas pemerintahan terkait yang ada di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Dapat menjadi literatur tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi yang membacanya.
- c. Salah satu syarat memperoleh derajat S1 pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

